

Pendapatan Asli Daerah- PAD Sulsel semester I-2024 tercapai Rp4,50 triliun



Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan (Sulsel) Supendi. ANTARA/Muh Hasanuddin

Sumber gambar:

<https://www.antaranews.com/berita/4230223/pad-sulsel-semester-i-2024-tercapai-rp450-triliun#:~:text=PAD%20Sulsel%20semester%20I%2D2024,Rp4%2C50%20triliun%20%2D%20ANTARA%20News>

Penerimaan PAD Sulsel periode semester I-2024 sedikit lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,

Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat pendapatan asli daerah (PAD) provinsi ini telah tercapai Rp4,50 triliun hingga semester I-2024 atau tumbuh 5,41 persen.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sulsel Supendi, di Makassar, Rabu, mengatakan penerimaan PAD Sulsel meliputi pajak daerah, penerimaan lain-lain yang sah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan retribusi daerah.

"Untuk kinerja PAD Sulsel cukup baik dan pada semester I-2024 ini sudah tercapai Rp4,50 triliun atau sekitar 36,83 persen dari pagu Rp12,08 triliun," ujarnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Supendi menyatakan penerimaan PAD Sulsel periode semester I-2024 sedikit lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp3,2 triliun secara tahunan atau year on year (yoy).

Ia merincikan jenis penerimaan pajak daerah terkumpul Rp3,2 triliun atau peningkatan 4,01 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp3,09 triliun (yoy).

Pada PAD lain-lain yang sah terkumpul Rp830,52 miliar atau tumbuh sekitar 16,84 persen (yoy) dari periode sebelumnya Rp710,82 miliar.

Sedangkan untuk penerimaan dari jenis kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami kontraksi minus 10,09 persen, yakni Rp292,63 miliar berbanding Rp325,11 miliar (yoy).

Hal sama terjadi pada penerimaan retribusi daerah yang sudah mengumpulkan Rp159,03 miliar tumbuh 14,20 persen (yoy) dari yang sebelumnya Rp139,25 miliar.

Supendi pun menyatakan jika pajak daerah itu ditopang oleh pajak nonkonsumtif, seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak penerangan jalan.

Menurut Supendi, bukan cuma pajak nonkonsumtif yang mengalami peningkatan, tetapi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran juga alami peningkatan.

"Jadi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran, mereka semua mengalami kenaikan yang luar biasa, ini artinya aktivitas masyarakat dan ekonomi di daerah sudah mulai meningkat," katanya pula.

Adapun pajak daerah nonkonsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) itu terealisasi Rp810,87 miliar diikuti bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terealisasi Rp456,52 miliar

Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp456,51 miliar, dan pajak penerangan jalan tercapai Rp385,13 miliar.

"Untuk pajak konsumtif terbesar pada pajak restoran sebesar Rp167,47 miliar, pajak hotel Rp69,73 miliar, pajak hiburan sebesar Rp14,09 miliar, dan pajak parkir sebesar Rp9,98 miliar," kata Supendi pula.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, mencatat pada 2023 realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp1,56 triliun atau 79,78 persen dari target Rp1,96 triliun pada 2024.

"Ini memberikan gambaran yang secara kumulatif meningkat dari segi nominal, dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya," kata Kepala Bapenda Makassar yang juga Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra saat menyampaikan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat DPRD Kota Makassar, Makassar, Sulsel, Jumat 14 Juni 2024.

Pada kesempatan itu, Firman juga mengingatkan ke depan tantangan dan persoalan yang muncul terkait optimalisasi pendapatan daerah begitu besar. Firman pun berharap upaya dan kerja keras serta sinergi yang telah terbangun selama ini dalam meningkatkan PAD tetap dipertahankan dan bahkan lebih ditingkatkan.

"Secara khusus kepada seluruh jajaran eksekutif, utamanya SKPD pengelola pendapatan, saya minta untuk lebih fokus meningkatkan kinerja, kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap berpedoman teguh pada kaidah hukum yang berlaku," urainya.

Terkait capaian pendapatan pada 2023, ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan para anggota Dewan atas pengawasannya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Dalam penjelasannya, Firman mengatakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikannya merupakan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, alur kas dan catatan Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang telah disesuaikan dengan koreksi dan rekomendasi hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Menurut Firman, berbagai program dan kegiatan pada 2023 telah terlaksana dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui sejumlah kendala dan tantangan. Namun, dapat teratasi atas dukungan berbagai pihak utamanya dari para anggota dewan.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesepahaman serta upaya dan sinergisitas yang berjalan dengan baik pihak eksekutif dan legislatif dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Sumber Berita:

1. <https://www.antarane.ws.com/berita/4230223/pad-sulsel-semester-i-2024-tercapai-rp450-triliun#:~:text=PAD%20Sulsel%20semester%20I%2D2024,Rp4%2C50%20triliun%20%2D%20ANTARA%20News>
2. <https://linksulsel.com/kepala-bapenda-makassar-sebut-realisisasi-pad-capai-1-56-triliun-rupiah.html>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.